**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (PAMSIMAS) DI DESA BARIMBUN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG.**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

WINTI AULIA

NIM. 220632013549

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG**

**TAHUN 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (PAMSIMAS) DI DESA BARIMBUN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

1. Nama : WINTI AULIA

NIM : 2206.3201.3549

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik/Negara

1. Disetujui oleh

Pembimbing : H.Jamaludin,SE, MAP (……………)

: NIDK. 8845930017

Penguji I : Heni Suparti,S.A.P.,M.A.P (……………)

: NIDN. 1129118902

Penguji II : Muhammad Taufik,S.Pd.I,M.Pd (……………)

: NIDN. 1107098901

1. Dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~ dalam mempertahankan ujian skripsi pada tingkat Starata Satu (S-1) pada tanggal 29 Juli 2024.

Mengetahui : Tanjung, 29 Juli 2024

Ketua STIA Tabalong Ketua Prodi Ilmu Adm.Publik

Hj.Rahmi Hayati.,S,sos.,M.A.P Lilis Suryani.,S.A.P.,M.A.P

NIK. 005057012 NIK. 005022085

**LEMBAR PERSETUJUAN**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (PAMSIMAS) DI DESA BARIMBUN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

OLEH :

WINTI AULIA

NIM : 220632013549

Tanjung, 29 Juli 2024

H.Jamaludin,SE, MAP

NIDK. 8845930017

PEMBIMBING

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winti Aulia

NIM : 2206.32.01.3549

Jurusan : Administrasi Negara

Judul :Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Program Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Pamsimas) Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian saya sendiri, segala data dan keterangan diperoleh dari Kantor Desa Barimbun, yang diungkapkan sebagaimna mestinya. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan untuk keperluan yang lainoleh pihak manapun. Dalam hal penulisan yang dituangkan menjadi sebuah karya tulis peneliti mengambil berbagai sumber kutipan dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini terdapat bukti mengcopy secara keseluruhan hasil karya/naskah skripsi orang lain, maka saya bersedia hasil karya berupa naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Winti Aulia

220632013549

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada Ketua STIA Tabalong Ibu Hj.Rahmi Hayati, S.sos., M.A.P dan Ketua Program Studi Administrasi Negara STIA Tabalong Ibu Lilis Suryani, S.Ap, M.AP. Bapak H.Jamaludin,SE, MAP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi serta memberikan arahan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini. Rekan rekan pemerintah desa dan juga masyarakat yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Tamliha dan Ibu Kamriah yang telah memberikan dukungan penuh untuk penulis sampai akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kepada saudara penulis dirumah Abdi Rahman dan tiga kakak perempuan hebat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi Dina Nopitasari, Wahyuyyuha Fitria dan Norsa’dah dalam setiap tahapan skripsi ini dibuat. Tidak lupa ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada diri sendiri karena sudah berjuang hingga bisa melewati semua hal.

Tanjung, 29 Juli 2024

Penulis,

Winti Aulia

NIM. 220632013549

**RINGKASAN**

Winti Aulia, NIM. 220632013549 Program Strata 1 Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong 2024. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong . Dosen Pembimbing H.Jamaludin,SE, MAP.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan lima informan dan data sekunder diperoleh dari Kantor Desa Barimbun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

**Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, Program Pamsimas.**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad S A W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Program Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Pamsimas) Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak H.Jamaludin,SE, MAP selaku Dosen Pembimbing karena telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dalam hal tata bahasa, teknik penulisan maupun segi ilmiah, hal ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Tanjung, 29 Juli 2024

Penulis

Winti Aulia

NIM. 220632013549

**DAFTAR ISI**

**HALAMA JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN i**

**LEMBAR PERSETUJUAN ii**

**PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI iii**

**UCAPAN TERIMAKASIH iv**

**RINGKASAN v**

**KATA PENGANTAR vi**

**DAFTAR ISI vii**

**DAFTAR TABEL ix**

**DAFTAR GAMBAR x**

**DAFTAR LAMPIRAN xi**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 4
3. Tujuan Penelitian 5
4. Manfaat Penelitian 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8**

1. Penelitian Terdahulu 8
2. Kerangk Teori 14
3. Implementasi 14
4. Kebijakan Publik 17
5. Implementasi Kebijakan Publik 24

**BAB III METODE PENELITIAN 35**

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan 35
2. Lokasi Penelitian 36
3. Sumber Data 36
4. Teknik Pengumpulan Data 37
5. Teknik Analisis Data 39
6. Uji Kreadibilitas Data 40
7. Waktu Penelitian 42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44**

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 44
2. Deskripsi Hasil Penelitian 46
3. Pembahasan Penelitian 71

**BAB V KESIMPULAN 77**

1. Kesimpulan 77
2. Saran 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

**NO JUDUL TABEL HALAMAN**

TABEL 1. Kriteria Pengukuran 42

TABEL 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara 68

TABEL 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara 68

TABEL 4. Rekapitulasi Hasil Wawancara 69

TABEL 5. Rekapitulasi Hasil Wawancara 69

TABEL 6. Rekapitulasi Hasil Wawancara 70

TABEL 7. Rekapitulasi Hasil Wawancara 70

TABEL 8. Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Wawancara 71

**DAFTAR GAMBAR**

**NO Judul Gambar Halaman**

Gambar 1. Kerangka Konseptual 34

Gambar 2. Komponen Analisa Model Interaktif 38

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Kartu Konsultasi Skripsi
3. Surat Izin Keterangan Bebas Plagiasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keputusan (SK) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Dokumentasi

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyehatan lingkungan merupakan upaya pengendalian faktor risiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial. Penyediaan air bersih desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesehatan publik dan pembangunan sosial ekonomi di desa desa terpencil. Akses terhadap air bersih yang memadai akan membantu masyarakat desa menjaga kebersihan pribadi mereka, seperti mencuci tangan dan mandi secara teratur. Air bersih juga penting untuk kebutuhan minum dan measak sehari-hari. Dengan adanya akses yang memadai terhadap air bersih, resiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan infeksi saluran kencing dapat dikurangi dengan signifikan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millenium yakni 100% *Universal Access* pada tahun 2019. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penyedia Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan rencana/program pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas  bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan  Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAMSIMAS I (2008-2012) dan PAMSIMAS II (2013-2015), telah berhasil menambah akses sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa di lebih dari 12.000 desa/kelurahan yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia.

Beberapa masalah dari Observasi sementara yang peneliti dapatkan di Kecamatan Tanta desa Barimbun adalah :

1. Akses layanan dalam penggunaan yang terbatas dalam sehari masyarakat hanya bisa mendapatkan air pada pagi hari, saat waktu siang dan malam pamsimas sudah tidak bisa digunakan karena keterbatasan air di penampungan.
2. Banyak masyarakat yang malas membayar sehingga menyebabkan pembeliaan pulsa terbatas yang berdampak pada jumlah air yang di salurkan juga terbatas.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup sehat.

Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan mengambil judul **“**Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Program Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Pamsimas) Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”.

1. **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian dan karya ilmiah terdapat rumusan masalah yang akan merumuskan agar lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti dan memberikan solusi yang di peroleh secara ilmiah dalam masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong?
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong?
2. **Manfaat Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah, sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan, aktifitas kerja sama untuk mempelajari fenomena yang ada dalam realitas dipelajari secara objektif dengan maksud membangun pemahaman yang valid mengenai fenomena itu. Dengan demikian penulis mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah :
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara mengenai pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati.
3. Sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan peraturan daerah maupun bupati.
4. Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berpikir ilmiah sistematis ketika melihat suatu fenomena yang ada disekitar.
5. Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :
6. sebagai informasi terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
7. Sebagai sumber bacaan, referensi, dan informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
8. Dapat memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksanaan kesehatan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
9. Manfaat bagi mahasiswa/mahasiswa, sebagai referensi perkembangan ilmu administrasi di bidang implementasi kebijakan serta sebagai perbandingan bagi peneliti lain, khususnya yang melakukan penelitian terhadap masalah yang serupa.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa, dosen dan pemerintah sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi dari adanya program desa sehat sebagai bahan referensi, kajian terdahulu menjadi sebuah pedoman dan batasan-batasan untuk menggali kembali penelitian mengenai desa sehat. Bedasarkan pencarian mengenai hasil kajian yang terdahulu maka ditemukan beberapa kajian yang relevan, dengan kajian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Erwin (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyrakat (Pamsimas) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, merupakan kumpulan infomasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek dan objek penelitian yaitu hasil wawancara dari informasi peneliti.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan dan kantor desa Bintang Ara yang berkitan dengan Implementasi Program Penediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di lihat dari Aspek Sumber Daya di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan hasil penelitan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dikategorikan terimplementasi.

1. Riska Firdaus (2020) melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yang dalam penelitiannya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara langsung bersamaan, yaitu Kondensasi Data, Display Data, dan Conclusion. Disimpulkan oleh peneliti bahwa memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat menjadi penerima dari program Pamsimas tersebut. Karena tujuan dari program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkannya akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air bersih khususnya yang berada di daerah tertinggal.

1. Selin Nur Rizki melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Maysarakat Desa Kab.Semarang dan Desa Timpik serta dari beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan media internet. Desa Timpik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang mendapatkan kesempatan dalam melaksanakan program PAMSIMAS. Dalam implementasinya, seluruh elemen yang berperan dalam program PAMSIMAS yaitu Lembaga Pengelola dan Pengurus baik dari Desa maupun Kabupaten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan berbagai manfaat terutama dalam bidang tersedianya akses air minum untuk mereka. Kebutuhan akan air minum masyarakat Desa Timpik menjadi mudah sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun masih ada beberapa kendala hingga saat ini yang masih membuat program PAMSIMAS ini tidak selalu berjalan lancar dalam mengalirkan air ke pengguna. pDikatakan bahwa implementasi program PAMSIMAS dinilai belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

1. Petter Yoseph Sollar,Sarah Sambiran dan Welly Waworunden Vol.3, No. 2, 2023 ISSN: 2088-2815. Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku Kabupaten pelaksana program PAMSIMAS.

Fokus penelitian ini menitikberatkan melalui teori dari George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) di dalam Irsanya (2015:16) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

2*.* Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkahlangkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Hasil Penelitian:

Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, Hasil penelitian ini menunjukkan dalam implementasinya, seluruh elemen yang berperan dalam program Pamsimas yaitu Lembaga Pengelola dan Pengurus baik dari Desa maupun Kabupaten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan berbagai manfaat terutama dalam bidang tersedianya akses air minum untuk mereka.

1. Siti Chusniati Vol.2 No.2 Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan ”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada komponen program yaitu pemberdayaan masyarakat, pelayanan sanitasi, penyediaan sarana air minum, dan dukungan manajemen pelaksana program.

1. Helva Rahmi, Nova Elsyra Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Dusun Sungai Mancur” . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) pada Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo masih belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang tertuang dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program PAMSIMAS. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Dusun Sungai Mancur yang BABS di Sungai sehingga PHBS masih belum menjadi kebiasaan. Kemudian pada pelaksanaan program PAMSIMAS seperti pembahasan RKM dan gotong royong mengumpulkan material bangunan fisik PAMSIMAS banyak masyarakat yang enggan terlibat.
2. **Kerangka Teori**
3. **Implementasi**
4. **Pengertian Implementasi**

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2020: 146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Implementasi merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif (Rahayu Dewi, 2016: 154).

Menurut Widodo (Sutojo, 2015: 4) menyatakan implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan pendek, menengah dan panjang, Syaukani dkk (Pratama, 2015: 229).

Menurut Meter dan Horn (Ratri, 2014: 4), menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Berarti proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan di anggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun hasil.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan, dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya suatu aktivitas dan hasil. Oleh karena itu implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang terkait dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

1. **Tujuan Implementasi**

Implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terkait oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utama pelaksanaan implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun tim.
2. Untuk memeriksa dan mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas (mutu).
6. **Kebijakan Publik**
7. **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa**.** Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebab sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

Menurut Irianto “Kebijakan disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan”. Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas.

Leo Agustino (2020: 144) kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar dan rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga maupun dengan pemerintah.

Menurut William N. Duun (Harbani Pasolong 2014: 39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Anderson (Leo Agustino, 2020: 16) Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang behubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 16).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat orang banyak atau publik, yang saling berhubungan serta dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan untuk bertindak berupa kegiatan yang diusulkan dan dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan dalam lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah melakukan kebijakan secara umum untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat.

1. **Aktor-Aktor Kebijakan Publik**

Secara umum ada beberapa aktor dan institusi yang terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan. Adapun aktor-aktor kebijakan publik, menurut Leo Agustino (2020: 25) yaitu :

1. Aktor yang terlibat langsung dalam proses formulasi kebijakan.
2. Aktor yang tidak terlibat proses formulasi kebijakan (tetapi ikut serta dalam memberikan masukan dan turut memberikan konten kebijakan publik).

Oleh karena itu aktor-aktor kebijakan yaitu berinteraksi, bersinggungan dan berkontribusi secara langsung dalam proses kebijakan, baik pembuatan kebijakan resmi, peserta tidak resmi*,*penjabat terpilihmaupun penjabat yang ditunjuk.

1. **Proses Kebijakan Publik**

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Dengan kata lain, dalam pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang ada pada proses kebijakan publik tersebut.

Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan, yaitu :

1. Pembuatan Agenda

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru. Legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elit, atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan.

1. Formulasi Kebijakan

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi di masa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestiminasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

Menurut James Anderson (Subarsono, 2013: 12-13) formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah politik serta siapa saja yang berpartisipasi didalamnya.

1. Adopsi Kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip- prinsip kebijakan. Dengan kata lain tahapan untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat. Serta membantu rekomendasi etimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

1. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

1. Evaluasi Kebijakan

Di bagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah.

1. **Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kebijakan Publik**

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu lingkungan, aktivitas pemerintah, perihal kebijakan, dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan. Berikut ini penjelasan dari ke empat faktor tersebut yaitu :

1. Lingkungan

Lingkungan dikelompokan kedalam tiga kategori. Pertama lingkungan umum diluar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan,dan nila-nilai seperti pola pengangguran, pola-pola paritisipasi politik, dan urbanisasi. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti struktural. Ketiga, lingkungan khusus dari kebijakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat sebelumnya.

1. Persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan

Persepsi pembuat kebijakan yang akurat maupun yang tidak akurat atas lingkungan-lingkungan itu, termasuk atas berbagai perstiwa dan kecenderungan yang terjadi di dalam pemerintahan maupun luar pemerintah, juga ikut mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat karena elit akan bertindak atas persepsi sendiri.

1. Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dua hal. Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan yang menyangkut intern pemerintah maupun yang menyangkut masyarakat umum. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang menyangkut upaya-upaya penyediaan sumberdaya bagi pelaksanaan kebijakan, membuat peraturan, petunjuk pelaksanaan, menyusun rencana detail kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan kemanfaatan.

1. Aktivitas masyarakat yang menyangkut kebijakan

ktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan yaitu: Pertama, pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan. Kedua, hasil program atau kebijakan dalam arti dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian.

**3. Implementasi Kebijakan Publik**

* 1. **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Adapun implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Yang mana aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik suprastruktur maupun insfrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Menurut Widodo (Pratama, 2013:230), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat crusial. Bersifat crusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Leo Agustino (2020: 144).

Menurut Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usahausaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Nugroho (2014:657).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2020: 150-153) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

1. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantng dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber day aitu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula hal nya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kineja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

1. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition)* Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hai ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down)* yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

1. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinas merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

1. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal yang terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan social, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi disebabkan oleh :

1. Kelompok sasaran tidak terlihat dalam implementasi program, bagaimana mungkin suatu implementasi program dapat berhasil apabila kelompok sasarannya tidak terlihat.
2. Program yang diimplementasikan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif serta masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
3. Adanya korupsi

Penyelahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku-perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

1. Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah

Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat akan sulit merealisasikan tujuan-tujuannya.

1. Tidak adanya koordinasi dan monitoring

Sangat penting dilakukan diantara Lembaga-lembaga pelaksana dan dengan penerima layanan.

1. **Kerangka Konseptual**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori yang mengemukakan bahwa indikator Implementasi Kebijakan di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn Meliputi. Uraian diatas dapat dilihat pada skema kerangka pikir berikut ini: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Uraian diatas dapat dilihat pada skema kerangka berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

**“Kerangka Konseptual”**

|  |
| --- |
| Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong |

**↓**

|  |
| --- |
| Implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Leo Agustino, 2020 : 150-153)   1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana 5. Komunikasi antar Organisasi 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. |

↓

|  |
| --- |
| Fenomen dilapangan   1. Akses Layanan penggunaan yang terbatas 2. Perilaku sebagian masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pembayaran iuran bulanan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. |

**↓**

|  |
| --- |
| Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong. |

**↓**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terimplementasi |  |  |
|  |  |

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan keadaan yang tampak dilapangan, yaitu berusaha menggambarkan tentang bagaimana Implentasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Menurut Creswell (Leo Agustino 2020: 211-212), penelitian kualitatif merupakan metode atau teknik untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individua tau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Karena itu, desain penelitian kualitatif dirancang dengan prosedur tertentu, mulai dari mengumpulkan data dari informan yang terlibat dalam *setting* konteks penelitian hingga peneliti membuat makna dari interpretasi data tersebut serta menghadirkan kompleksitas dari situasi yang ada dalam bentuk alternatif solusi.

Menurut Leo Agustino (2020: 212) Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pandapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang didefinisikan sebagai standar operasional prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang tertentu serta bisa juga dari perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Ada berbagai metode yang digunakan, metode yang dipilih peneliti harus sesuai dan berhubungan dengan prosedur.

1. **Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

1. **Sumber Data**
2. Data Primer, merupakan kumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek dan objek penelitian yaitu hasil wawancara dan informan penelitian.
3. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen laporan dan catatan yang ada.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantara adalah sebagai berikut :

* + - 1. Observasi

Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta mencatat kedalam catatan penelitian.

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan pelaksanaan program Pamsimas.

* + - 1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka secara langsung oleh peneliti dan responden dengan menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data , bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tengang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data yang telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.

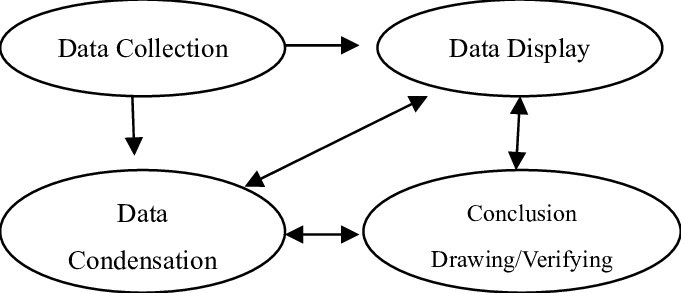
Adapun sumber Infomasi dari wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Kasi Pelayanan : 1 Orang
3. Pengelola Pamsimas : 1 Orang
4. Masyarakat : 2 Orang
   * + 1. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang didapat melalui sumber-sumber data yang relevan, berupa rekaman baik makalah, buku-buku, surat-surat maupun sumber informasi lainnya seperti arsip, dalil atau hukum-hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Imam Gunawan, (2015: 175), menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Gambar.2 Komponen Analisa Model Interaktif



*Sumber : Miles, Huberman dan Saldama (2014)*

1. **Teknik Analisis Data**

Menurut Koestoro teknik analisis data mencakup tiga kegiatan yakni:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah proses menyeleksi memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan atau mentranformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan, tertulis, transkip wancara, dokumen dan materi-materi (temuan) empiris lainnya. Bisa juga dikatakan kondensasi data merujuk pada proses pemilihan. Menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) dan dengan kondensasi prpses analisis data dalam penelitian kualitatif tentu akan lebih mengakomodir data seacara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian (proses penjaringan data) berlangsung.

1. Penyajian Data

Setelah data di kondensasi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif singkat (Sugiono, 2021:520). Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

1. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti.

1. **Uji Kredibilitas Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007 : 320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini uji *credibility.*

Dalam pengujian kredibilitas data tersebut bermacam-macam pengujian. Menurut Sugiyono (2012) menegaskan sebagaimana berikut. “ Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *member check.*

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, tiangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mencek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

1. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

1. Triangulasi Waktu

Untuk menguji kreadibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi dengan cara melakukan pengecekkan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang telah ditentukan peneliti. Peneliti melakukan trangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan.

Untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan maka peneliti membuat kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Pengukuran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kategori | Bobot | Kriteria |
| 1 | Sangat Baik | 5 | Apabila ke-5 informan menjawab iya |
| 2 | Baik | 4 | Apabila 4 informan menjawab iya |
| 3 | Cukup Baik | 3 | Apabila 3 informan menjawab iya |
| 4 | Kurang Baik | 2 | Apabila 2 informan menjawab iya |
| 5 | Tidak Baik | 1 | Apabila 1 informan menjawab iya |

1. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dar bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2024. Adapun rincian pelaksanaannya yaitu dimulai dari pengajuan judul dan penyusunan proposal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 2024 dan melaksanakan seminar proposal pada bulan Mei 2024. Setelah proposal diterima oleh Dosen Penguji dan Pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan penelitian langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data serta penulisan laporan yang dilakukan pada bulan Juli 2024, dan melaksanakan sidang skripsi pada bulam Juli 2024.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
2. Desa Barimbun merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tanta. Desa ini terletak pada 2º lintang Selatan dan 116º Bujur Timur. Adapun batas-batas Desa Barimbun adalah sebagai berikut :
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maburai
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Walangkir
5. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanta
6. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Warukin

Desa Barimbun terdiri dari 5 (lima) RT dengan jumlah kk per desa masing masing wilayah dapat dilihat berikut ini :

1. Barimbun Rt.01 139 kk terdiri dari 228 laki laki dan 230 perempuan
2. Barimbun Rt.02 320 kk terdiri dari 161 laki-laki dan 159 perempuan
3. Barimbun Rt.03 45 kk terdiri dari 81 laki-laki dan 58 perempuan
4. Barimbun Rt.04 140 kk terdiri dari 236 laki-laki dan 230 perempuan
5. Barimbun Rt.05 54 kk terdiri dari 79 laki-laki dan 95 perempuan.
6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan Program Pamsimas ini. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor utama keberhasilan program pamsimas dan juga salah satu indikator dalam pengukuran kepuasan masyarakat dalam program pamsimas. Berikut ini sarana dan prasarana yang ada pada desa Barimbun :

**Daftar Mekanisme Alat Pamsimas**

Ukuran tandon penampungan air : 3 x 3 meter

Ketinggian tandon penampungan air : 6 meter

Lokasi tandon penampungan air : Rt.04

Jarak mesin sedot dengan tandon : 15 meter

Jenis mesin yang digunakan : Yamama Pro

Ukuran pipa dari mesin ke tandon : 2,5 in

Ukuran pipa dari tandon ke masyarakat : 2,5 in

Biaya pemasangan : Rp.250.000

Biaya bulanan (beban) : Rp.10.000

Jumlah Pengguna Keseluruhan : 698 kk

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Implementasi Van Mater dan Van Horn sebagai alat untuk menganalisis, dalam model Imlementasi Van Mater dan Van Horn ini terdapat enah indikator yang membentuk hubungan antara kebijakan tentang kebijakan dengan pelaksanaan. Model ini tidak mengkhususkan hubungan antar variabel bebas (independen variable) dengan variabel tergantung (*dependent variable*), tetapi juga hubungan anatar variabel bebas itu sendiri. Enam variabel (indikator) yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Soail dan Politik (Leo Agustino, 2020 : 150-153).

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijkan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidak menentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan).

Peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian lapangan tentang dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijkan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

1. Menurut Bapa/Ibu apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Program ini sangat membantu masyarakat pasalnya masyarakat mendapatkan fasilitas air bersih dengan lebih mudah khususnya di saat musim kemarau tiba, hal ini kemudian menjadi daya tarik masyarakat unutk ikut serta menggunakan program Pamsias ini.”*

(wawancara, Senin 08 Jui 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Karena hal yang ditawarkan oleh program ini adalah kebutuhan pokok masyarakat dan itu yang menjadi kunci keberhasilannya, masyarakat menerima dan terjalankanlah program ini.”* (Wawancara, Senin 08 juli 2024)

Pengelola Pamsimas mengatakan :

*“ Program ini membantu masyarakat dalam pengadaan air, tidak sedikit keluhan tentang masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih lalu pada saat program ini akan berjalan masyarakat antusias terkhususnya mereka yang selalu mengambil air ke sungai.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Patokan dari program ini adalah semua masyarakat mendapatkan fasilitas air bersih dengan lebih mudah khususnya saat musim kemarau datang, kami merasa kebutuhan kami akan diberikan dan kami turut mendukung program ini”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Tentunya masyarakat yang mendukung juga menjadi tolak ukur karena tanpa masyarakat yang mendukung program ini hanya sekedar nama dan tidak terjalankan sebaimana yang di harapkan oleh pemerintah, kami juga tidak sembarang menerima program saat kami tahu program ini akan membantu kami dalam hal penyediaan air maka kami sngat setuju dan menerima.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/ada pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian program Pamsimas di desa Barimbun berdasarkan indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam tolak ukur keberhasilan program Pamsimas di desa Barimbun dikategorikan sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari program pamsimas ini dapat terealisasikan dengan baik di desa Barimbun?

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa :

*“ Tujuan dari program ini akan terjalankan dengan baik di desa Barimbun sebab air bersih adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari masyarakat juga sudah di beri pemahaman bagaimana program ini berjalan nantinya.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun juga menambahkan bahwa :

*“ Iya pasti dan akan terealisasikan dengan baik sebab masyarakat selalu memerlukan air dalam keseharian apalagi program yang diajalnkan ini adalah pengaliran air bersih”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola pamsimas juga mengatakan bahwa :

*“ Program ini adalah program yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat di desa apalagi saat musim kemarau melanda masyarakat sangat sulit mendapatkan air maka dari itu program ini tentunya akan berjalan dengan baik di desa kami.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Terjalankan dengan baik karena kami menganggap air bersih adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dan kami merasa senang juga terbantu saat program ini disampaikan akan dijalankan di desa kami”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat 2 pengguna mengatakan bahwa :

*“ Dapat terjalankan dengan baik karena tujuannya membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih khususnya menjamin saat kemarau tiba karena kami selalu kesusahan mencari air pada saat kemarau sudah datang.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa 5 orang sudah menjawab ya/sudah pada indikator Ukuran dan tujuan Kebijakan dalam program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi program Pamsimas di desa Barimbun berdasarkan indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam tujuan terealisasikan dengan baik dikategorikan sangat baik.

1. **Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijkan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia,sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbulmasalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

1. Menurut Bapak/Ibu dari segi sumber daya manusia apakah mereka mampu mengelola pamsimas agar program ini terlaksana dengan baik?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“Tentu saja karena untuk mencari pihak yang mampu mengelola kami berikan beberpa persyaratan dimana jika mereka tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka tidak bisa dijadikan sebga pihak pengelola.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan Desa Barimbun juga menambahkan :

*“Mampu karena mereka memiliki kriteria yang di syaratkan sebelumnya, masyarakat juga yang ikut serta ambil alih dalam penentuan kriteria-kriteria ini tentu saja sesuai dengan keinginan mereka sebagai pengguna untuk mendapatkan hal dilayani.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pihak pengelola Pamsimas mengatakan :

*“Kami selalu berusaha memberikan layaanan terbaik untuk masyarakat khususnya pada setiap keluhan karena ini untuk kesejahteraan kami bersama, karena bukan hanya masyarakat yang menggunakan kami sebagai pengelola juga termasuk sebagai pengguna program ini.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna1 mengatakan :

*“Pihak pengelola baik dalam mengelola program ini apapun keluhan dari kami mereka selalu sigap unutk mencek dan menggtasi permasalahan secepat mungkin.”*

(Wawancara, 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan :

*“ Pengelola selalu ready saat diperlukan dan tentu itu artinya baik, saat kami mengalami kesulitan sesaat setelah melapor mereka datang dan melihat apa penyebab dari kendala yang kami hadapi dan tentu itu artinya mereka bekerja dengan baik.”*

(Wawancara, 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan orang informan diatas dapat diketahui bahwa 5 orang menjawab ya/sudah pada indikator Sumber Daya dalam kemampuan pihak pengelola dalam program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kemampuan pihak pengelola dalam program Pamsimas di desa Barimbun dikategorikan sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu selain itu sumber daya lainnya seperti dana melalui anggaran apakah waktu dalam pengerjaan pembangunannya sesuai target?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“Sesuai saja karena dana sudah di turunkan dan pengerjaan langsung di gerakkan mulai dari pemesanan bahan-bahan unutk pembangunan Pamsimas itu sendiri.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“Dana memang sudah turun dan pengerjaan untuk pembangunan pamsimas sendiri juga di kerahkan untuk dilakukan secepatnya dalam hal pencarian tukang dan pembeliaan bahan-bahan bangunan.”*

Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola pamsimas mengatakan bahwa :

“ *Target pembangunan jangka waktunya tidak sesuai karena dana tidak full turun semua dan kesalahan awal berada saat pemilihan tukang yang tidak sesuai.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan :

*“Pada saat pembangunan kurang sesuai karena sebelum dioperasikan saja tong untuk penampungan air sudah bocor dan kendala awal air dari sumber tidak naik ke penampungan.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Pembangunannya terlalu lama karena dari awal mereka sudah salah dalam memilih tukang dan dana yang tidak turun full kala itu mengakibatkan program ini gak lambat beroperasi.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 2 informan menjawab ya/sudah dan 3 orang menjawab tidak/belum pada indikator Sumber Daya dalam target pembanguna Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka waktu pembanguna Pamsimas di desa Barimbun dikategorikan kurang baik.

1. **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana itu haruslah berkarakteristik tegas, keras dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

1. Menurut Bapak/Ibu dalam menentukan orang-orang yang akan mengelola pamsimas apakah ada kriteria-kriteria khusus?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Iya, karena dalam mengelola program ini kami memerlukan orang yang benar benar bisa berbaur dan menjelaskan kepada masyarakat terlebih saat ada masalah dalam penyaluran air.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi Pelayanan mengatakan bahwa :

*“ Tentu saja mereka yang terpilih menjadi pengelola harus memiliki sikap yang tegas, kami tidak menyarankan masyarakat yang cenderung takut unutk menjadi pengelola program ini.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Tentunya saat dicari masyarakat yang bersedia menjadi pihak pengelola ada beberapa hal yng harus dimiliki oleh orang itu, tentunya yang bisa berbaur dengan masyarakat adalah hal utama karena saat permasalah timbul pasti pengelola harus berdiskusi dengan masyarakat lalu selanjutnya pengelola juga harus aktif dan tegas.*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Dari pemerintah desa kemaren meminta memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan diri menjadi pengelola selain itu mereka juga memasukkan saran dari masyarakat untuk kriteria pengelola.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Tentu saja memiliki kriteria khusus untuk menjadi pengelola karena itu juga menjadi kebutuhan masyarakat supaya kami tertib dalam menaati peraturan program ini.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 orang menjawab ya/ada pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana dalam kriteria-kriteria khusus untuk para pengelola program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria khusus untuk pengelola dikategorkan sudah sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tindakan para pengelola pamsimas, dalam hal ini apakah tegas dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah di tetapkan?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Dari beberapa kali saya ke lapangan tidak ada keluhan dari masyarakat tenttang para pengelola ini bahkan mereka mengatakan bahwa para pengelola ini tegas dan memberikan sanksi kepada masyarakat apabila tidak mematuhi aturan yang di tetapkan.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan mengatakan bahwa :

*“ Tegas mereka memang menjalankan sesuai instruksi kriteria yang di tentukan awal para pengelola selalu menekankan juga kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan dalam penggunaan progra ini.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola pamsimas mengatakan bahwa :

“ *Kami juga memiliki beberapa aturan yang jika masyarakat melanggar maka akan kami beri sanksi sesuai kesepakatan yang kami buat bersama dalam musyawarah.”*

(Wawancara, Selasa 09Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Iya merka tegas tetapi mereka juga memberikan sedikit keringan jika masyarakat melanggar kesepakatan yang tentunya sudah di rundingkan dgn yang lain.”*

(Wawancara, Rabu 10Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Mereka ketat dalam aturan akan tetapi pihak pengelola juga berbaik hati, mereka mau membayarkan terlebih dahulu beberpa orang jikamasarakat memang tidak mempunyai uang untuk pembayaran.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan dengan informan diatas diketahui bahwa 5 informan menjawab iya/sudah pada indikator Karakterisk Agen Pelaksana dalam melaksanakan aturan sesuai dengan yang telah di tetapkan di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pengelola dalam menjalankan tugasnya dikategorikan sudah sangat baik.

1. **Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

1. Menurut Bapak/Ibu hal apa yang membuat masyarakat yakin dalam pertam kali penggunaan pamsimas ini?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Program ini bagus dan sangat penting karena dari air yang bersih masyarakat lebih terjamin kesehatannya, selain itu masyarakat juga diberi pemahaman tentang penggunaan air bersih ini karena banyak masyarakat yang menyepelekan tentang pentingnya air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayana n desa barimbun mengatakan bahwa :

*“Benar adanya diberi pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat pengguna agar mereka mengetahui manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya selain itu biaya beban perbulan yang tidak tinggi juga membuat masyarakat tertarik.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola Pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Mereka yakin karena pihak desa memberikan penjelasan apa dan bagaimana program ini nantinya berjalan sehingga dalam berjalannya program ini mereka bisa menuntuk hak dalam penggunaan jika yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1mengatakan bahwa :

*“ Kami yakin karena pemerintah desa menjelaskan dan kami paham karena bagaimanapun juga air bersih memang keperluan kami sehari-hari, penjelasan yang mudah dipahami membuat kami semakin yakin tentunya.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Mendengar dari apa yang di janjikan saat itu kami tertarik dan yakin untuk ikut program ini karena saat kemarau tiba sudah pasti kami akan sangat kesulitan mendapatkan air.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan ke informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/sudah pada indikator Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana untuk meyakinkan masyarakat dalam penggunaan program Pamsimas. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pemahaman kepada masyarakat dikategorikan sudah sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada respon penolakan dari masyarakat saat pamsimas ini akan dijalankan?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Tidak ada karena bukan penolakan mereka hanya cenderung tidak mengerti untuk apa program ini maka dari itu harus ada kesamaan pemahaman terlebih dahulu.*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Tidak mereka senang saja saat program ini akan berjalan akan tetapi saat awal program ini harus dijelaskan dengan detail kepada masyarakat.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pihak pengelola Pamsimas mengatakan bahwa:

*“ Tidak ada mereka hanya minta di jelaskan saja bagaimana program ini, bagaimana sistem berjalan kedepannya apa keuntungan yang akan mereka dapatkan nanti.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Tidak, kami malah senang saat program air di adakan di desa ini karena jujur saja air ini hal utama yang penting dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya bagi ibu rumah tangga yang melakukan aktivitas dirumah.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatkan bahwa :

*“ Kami menerima program ini dengan baik, mungkin ada beberapa orang yang sudah berlanjut usia saja yang harus lebih diberi pemahaman karena faktor usia juga mempengaruhi pemahaman.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan ke informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab tidak/belum ada pada indikator Sikap atau Kecenderungan Agen Pelaksana pada respon penolakan dari masyarakat terhadap program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program ini diterima di desa barimbun dengan kategori sangat baik.

1. **Komunikasi Antar Organisasi**

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak pengelola melakukan koordinasi dengan masyarakat tentang kendala apa saja yang terjadi di lapangan?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Tentu saja masyarakat itu sebagai pengguna harus menjadi perhatian dari pihak pengelola,mereka selalu melakukan koordinasi dan perbincangan ringan terhadap kendal-kendala yang terjadi di program Pamsimas ini. ”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Selalu, mereka selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat tidak hanya menunggu pelaporan tetapi mereka kadang bertanya sendiri apakah ada kendala di para pengguna.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pihak pengelola Pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Kami melakukan koordinasi selalu kepada masyarakat karena setiap ada kendala juga pasti kami yang menangani, selain itu masyarakat juga cepat dalam pelapotan jika ada kendala yang terjadi membuat kami juga cepat dalam hal penanganan.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Meraka itu selalu bertanya saat iuran apakah ada kendala disetiap harinya mereka juga menghimbau kami agar selalu cepat dalam pelaporan jika terjadi kendala.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Pihak pengelola ini sangat perhatian kepada pengguna karena mereka juga memakai program ini mereka selalu menanyakan apakah ada kendala atau tidak.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/sudah pada indikator Komunikasi antar Organisasi pihak pengelola dan masyarakat dalam program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola dalam menjalankan hal koordinasi permasalahan dengan masyarakat dikategorikan sudah sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan pengelola terhadap keluhan yang di terima?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“Mereka biasanya mengajak masyarakat untuk bermusyawarah bersama jika ada ditemukan masalah yang besar, namun jika hal kecil saja yang diterima merka langsung mendatangi rumah masyarakat tersebut unutk dilakukan pengecekkan.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Jika masalah itu hanya per rumah mereka langsung mencari penyebabnya tetapi apabila masalahnya timbul dari sarana dan prasarana mereka melakukan musyawarah dengan masyarakat.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola Pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Kami sebisa mungkin mengatasi masalah itu dengan cepat supaya masyarakat tetap nyaman dalam menggunakan program ini, jika masalahnya kecil akan kami atasi sendiri namun apabila besar dan perlu pertimbangkan kami ajak masyarakat untuk berdiskusi.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Para pengelola selalu melakukan musyawarah dengan kami masyarakat setempat jika ada kendala dalam penyaluran air bersih, mereka juga memberikan ruang untuk kami memberikan saran kepada mereka.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Pihak pengelola selalu mendengarkan keluhan kami, biasanya di tentukan di rumah masyarakat lalu rembuk untuk membahas kendala-kendala yang terjadi di dalam penyaluran air.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/sudah pada indikator Komunikasi antar Organisasi terhadap penyelesaian masalah oleh pengelola untuk masyarakat pengguna program Pamsimas di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah oleh pihak pengelola dapat dikategorikan sudah terlaksana dengan baik.

1. **Lingkungan Ekonomi, Ssoaial dan Politik**

Hal terakhir juga yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan konndisi lingkungan.

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Sejauh ini lingkungan eksternal sangat mendukung program ini dilaksanakan di desa kami, karena sama halnya dengan kami beberapa desa juga melaksanakan program ini dan berjalan dengan baik, mereka berharap program ini akan berjalan demikian juga di desa kami”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

*Kasi pelayanan desa Barimbun mengatakan bahwa :*

*“ Tentu saja mendukung karena ini adalah program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, selain itu program ini juga dilakukan oleh beberapa desa yang mana mereka saling support untuk sama sama mensukseskan program ini disetiap desa.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pengelola Pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Ada desa yang antusias saat program ini akan dijalankan di desa kami karena di luar juga mereka melaksanakan program ini, mereka mendukung kami saat pertama kali program ini akan dijalankan karena kesejahteraan masyarakat membuat para pemerintah desa bukan hanya di desa kami tapi di beberpa desa tetangga juga ikut senang akan kemudahan masyarakat nantinya untuk mendapatkan air bersih.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Mendukung saja karena program ini sepertinya hampir semua desa melakukan, dan harapannya pasti program ini terjalankan dengan baik dan sukses kedepannya.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“ Sepertinya lingkungan eksternal mendukung program ini di desa kami karena saat pembangunan ini dilaksanaka ada melihat pemerintah desa lain ikut bersama kepala desa kami mengontrol proses pembangunan.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/ada pada indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Budaya terhadap dukungan program Pamsimas yang berjalan di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal turut mendukung dengan sangat baik.

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan lingkungan di desa apakah kondusif atau ada beberap faktor penghambat yang mengakibatkan kegagalan program tersebut?

Kepala desa Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Lingkungan di desa baik saja termasuk lingkungan sosial ekonomi dan juga politik yang ada disini mereka tidak mempengaruhi hal buruk untuk tujuan dan kinerja pengelolaan program ini, beberapa faktor penghambat itu tentu ada tapi bisa ditangani dan beberapa faktor penghambat yang sensitif kami cukup simpan sendiri.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Kasi pelayanan des Barimbun mengatakan bahwa :

*“ Lingkungan kami mendukung akan program ini baik dari segi apapun, faktor penghambat itu hanya sebagian kecil yang bisa segera di atasi dengan baik.”*

(Wawancara, Senin 08 Juli 2024)

Pihak pengelola Pamsimas mengatakan bahwa :

*“ Lingkungan kami kondusif akan tetapi faktor penghambat yaitu saat pemilihan tukang awal kami salah akan tetapi itu tidak mengakibatkan program ini gagal di teruskan dan dijalankan.”*

(Wawancara, Selasa 09 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 1 mengatakan bahwa :

*“ Bagi kami lingkungan disini baik-baik saja tidak ada yang menghambat pemerintah untuk menjalankan program pamsimas di desa kami, hal-hal seperti adanya partai politik tidak mencampuri program ini untuk berjalan kedepannya.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Masyarakat pengguna 2 mengatakan bahwa :

*“Kondusif sangat kondusif karena kami memang menerima program ini jadi mudah bagi pemerintah desa untuk menyalurkan program ini kedepannya.”*

(Wawancara, Rabu 10 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa 5 informan menjawab ya/sudah pada indikator Lingkungan, Ekonomi , sosial dan Politik terhadap ke kondusifan lingkungan di desa Barimbun. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan di desa Barimbun kondusif dan sangat baik.

Tabel.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Ukuran dan Tujuan Kebijakan :** |  |
| 1 | Apakah Tujuan Program Pamsimas dapat terealisasikan? | Sangat Baik |
| 2 | Apa saja Tolak Ukur Keberhasilan program Pamsimas? | Sangat Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), dikategorikan sangat baik.

Tabel.3 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Sumber Daya :** |  |
| 1 | Apakah Sumber Daya Manusia mampu dalam mengelola Program Pamsimas? | Sangat Baik |
| 2 | Apakah Kemampuan sumber daya finansial dan waktu sesuai? | Cukup Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Sumber Daya menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), dikategorikan cukup baik.

Tabel.4 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Karakteristik Agen Pelaksana:** |  |
| 1 | Apakah Kriteria kriteria untuk pengelola ada dan terpenuhi? | Sangat Baik |
| 2 | Apakah tindakan para pengelola sesuai dengan aturan yang dibuat? | Sangat Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Karakteristik Agen Pelaksana menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), dikategorikan sangat baik.

Tabel.5 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana:** |  |
| 1 | Apakah hal-hal untuk meyakinkan masyarakat telah diberikan? | Sangat Baik |
| 2 | Apakah Program ini berhasil diterima atau ada penolakkan? | Sangat Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), dikategorikan sudah sangat baik.

Tabel.6 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Komunikasi antar Organisasi:** |  |
| 1 | Pihak pengelola sealu melakukan koordinasi dengan masyarakat? | Sangat Baik |
| 2 | Cara yang dilakukan pihak pengelola untuk menangani masalah yang ada dilapangan? | Sangat Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar Organisasi menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153),dikategorikan sudah terlaksana dengan sangat baik.

Tabel.7 Rekapitulasi Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Hasil |
|  | **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik:** |  |
| 1 | Pihak pengelola sealu melakukan koordinasi dengan masyarakat? | Sangat Baik |
| 2 | Cara yang dilakukan pihak pengelola untuk menangani masalah yang ada dilapangan? | Sangat Baik |

Berdasarkan hasil wawancara seperti pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), dikategorikan sudah sangat baik.

Tabel.8 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Wawancara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Hasil** |
| 1 | Ukuran Dan Tujuan Kebijakan | Sangat Baik |
| 2 | Sumber Daya | Cukup Baik |
| 3 | Karakteristik Agen Pelaksana | Sangat Baik |
| 4 | Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana | Sangat Baik |
| 5 | Komunikasi antar Organisasi | Sangat Baik |
| 6 | Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik | Sangat Baik |

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi 6 indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Aksi Derah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (PAMSIMAS) di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dikategorikan sudah Terimplementasi dengan baik.

1. Pembahasan Penelitian
2. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu untuk meyakinkan masyarakat agar bisa menggunakan program ini dengan tolak ukur keberhasilan yang menguntungkan bagi masyarakat karena selain merealisasikan program pemerintah ini juga membantu masyarakat dalam kesehariannya untuk mempermudah mendapatkan air bersih. Ukuran dan Tujuan Kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153) pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan Barimbun dikatan terimplementasi , hal ini terlihat dari jawaban wawancara dengan 5 informan yang mengatakan bahwa tujuan dari program ini akan terealisasikan dengan sangat baik di desa Barimbun.

Diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Riska Firdaus (2020) Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indokator Tujuan dan Kebijakan dikategorikan Terimplementasi.

1. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Sumber Daya menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu manusia dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya manusia selain itu sumber daya finansial dan waktu juga tidak kalah penting dalam hal ini. Dari indikator sumber daya manusia dikatakan oleh 5 informan sudah terimplementasi dengan baik. Namun pada indikator sumber daya finansial dan waktu 3 infroman mengatakan belum sesuai dan dikategorikan cukup baik dalam pengimplementasiannya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jurnal penelitian terdahulu oleh Erwin (2023) Implementasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilihat dari Aspek Sumber Daya di des Maruga kecamatan Dusun Utamra Kabupaten Barito Selatan, bahwa kemampuan dan jumlah staf sangat berpengaruh dengan pengimplementasian sebuah program.

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa Indikator Karakteristik Agen Pelaksana menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu dalam menjalankan program pihak pengelola harus memiliki kriteria dan mampu melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Dari indikator Karakteristik Agen Pelaksana di desa Barimbun oleh 5 informan dikatakan sudah dijalankan dengan sangat baik.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jurnal penelitian Selin Nur Rizki (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam implementasinya, seluruh elemen yang berperan dalam program Pamsimas yaitu Lembaga Pengelola dan Pengurus baik dari Desa maupun Kabupaten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan berbagai manfaat terutama dalam bidang tersedianya akses air minum untuk mereka.

1. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa Indikator Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu sikap penerimaan atau penolakkan yang akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implentasi kebijakan publik. Dari indikator bahwa Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana di desa Barimbun dikatakan oleh 5 informan sudah terlaksana dengan baik.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jurnal penelitian terdahulu Siti Chusniati (2018) Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Trenggalek. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada komponen program, semua tingkat terdapat kesepakatan komitmen antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan berbagai kalangan pejabat di daerah, mulai kabupaten hingga pedesaan, tingkat RW dan RT.

1. Komunikasi antar Organisasi

Dapat disimpulkan bahwa Indikator Komunikasi antar Organisasi menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu syarat utama dalam mentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dari indikator Komunikasi antar Organisasi di desa Barimbun dikatakan oleh 5 informan sudah terjalankan dengan sangat baik.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jurnal penelitian terdahulu oleh Petter Yoseph Sollar,Sarah Sambiran dan Welly Waworunden (2023) Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum dilaksanakan secara optimal seperti yang ada di Desa Sawang adanya partisipasi dan responsive dari masyarakat dan komunikasi yang baik dijalankan hingga program ini dikategorikan terimplemntasi.

1. Lingkungan Ekonomi,Sosial dan Politik

Dapat disimpulkan bahwa Indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut Van Mater dan Van Horn (2020 : 150-153), yaitu adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan yang telah di tetapkan dan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan internal. Pada indikator Indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Budaya di desa Barimbun dikatan terimplementasi , hal ini terlihat dari jawaban wawancara dengan 5 informan yang mengatakan bahwa lingkungan eksternal dan lingkungan di desa barimbun sangat baik, hal ini yang mendukung program pamsimas terimplementasi di desa Barimbun.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan jurnal penelitian terdahulu oleh Helva Rahmi dan Nova Elsyra (2022) Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Dusun Sungai Mancur. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pamsimas melibatkan seluruh lapisan masyarakat (laki-aki dan perempuan, kaya dan miskin) untuk bersama-sama dalam mensukseskan program tersebut. Mulai dari tahapan pembahasan RKM hingga pelaksanaan pembangunan fisik. Kemudian selanjutnya pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun dikembalikan kepada masyarakat. Faktor lingkungan eksternal yang juga terut mendukung menjadikan program ini terimplementasikan dengan baik di Dusun Sungai Mancur.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Desa Barimbun dikategorikan Terimplementasi.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong di Desa Barimbun sudah terlaksana dengan baik. Penulis menyarankan agar pemerintah desa lebih memperhatikan dan memastikan pendanaan yang diluncurkan sesuai 100%, dan inisiatif dari masyarakat yang bisa terlebih dahulu menutupi kekurangan pendanaan dengan bersama sama mengumpulkan uang pribadi untuk melanjutkan pembangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akib,H. (2010). Implementasi Kebijakan: apa,mengapa dan bagaimana. *Administrasi Publik*, 1-11.

Dewi,D.S.K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik proses, implementasi dan evaluasi.* Bumi Aksara.

Eko Widodo,Suparno. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Handoyo,E. (2012). *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.

Loe Agustino, Ph.D. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Muhammad Idrus. (2009). *Sistem Pendukung Keputusan Teori dan Implementasi.* Deepublish.

Mulyasa, H.E. (2021). *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi.* dalam era.

Nanang Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis isi dan Analisis data.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial, konsep-konsep kunci.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nur,A.C dan & Guntur,M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik.* Makassar: UNM.

Prof.dr.Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A.M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan gabungan.* Prenada Media.

Hayati, R. (2023). Implementasi Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyrakat (Pamsimas) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *JAPB*, *6*(2), 884-895.

chusniati, siti, et al. (2018). implementasi kebijakan program penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di kabupaten trenggalek . *jurnal mediasosian : jurnal ilmu sosial dan admninstrasi negara*, 2.2.

Riska Firdaus. (2020). implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di desa berigin jaya kecamatan baebunta selatan kabupaten luwu utara. *i la galigo, public administration journal*, 1-8.

riski, selli nur. (2018). analisis implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di kabupaten semarang (studi kasus desa timpik kecamatan susukan) . *journal of politic and government studies*, 221-230.

Sollar,petter yoseph, sambiran,sarah,waworundeng, welly. (2023). implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di pulau siau kabupaten kepulauan siau tangulangan biaro. *governance*.

Rahmi, H., & Elsyra, N. (2022). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Dusun Sungai Mancur

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, *6*(1), 106-117.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tntang program pembangunan yang berkeadilan.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

**PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian:

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Program Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (PAMSIMAS) di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Teori: Implementasi Kebijakan menurut Donald Van matter dan Carl Van Horn (dalam Leo Agustino, 2020 : 150-153)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi antar Organisasi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Informan :

Hari/Tgl wawancara :

Tempat :

Waktu :

(Ukuran dan Tujuan Kebijakan)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pogram pamsimas ini dapat terealisasikan dengan baik di desa Barimbun?
2. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini?

(Sumber Daya)

1. Menurut Bapak/Ibu dari segi sumber daya manusia apakah mereka mampu mengelola pamsimas agar program ini terlaksanakan dengan baik?
2. Menurut Bapak/Ibu selain itu sumber daya lainnya seperti dana melalui anggaran apakah benar tersedia dan apakah waktu dalam pengerjaan pembangunannya cukup sesuai target?

(Karakteristik Agen Pelaksana)

1. Menurut Bapak/Ibu dalam menentukan orang-orang yang akan mengelola pamsimas apakah ada kriteria-kriteria khusus?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tindakan para pengelola pamsimas, dalam hal ini apakah tegas dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah di tetapkan? Contohnya seperti masyarakat yang terlambat membayar iuran apakah ada sanksi atau kesepakatan yang di dapatkan oleh masyarakat tersebut?

(Sikap atau Kecenderungan *Disposition* para Pelaksana)

1. Menurut Bapak/Ibu hal apa yang membuat masyarakat yakin dalam pertama kali penggunaan pamsimas ini?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada respon penolakan dari masyarakat saat pamsimas ini akan dijalankan?

(Komunikasi antar Organisasi)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pengelola melakukan koordinasi dengan masyarakat tentang kendala apa saja yang terjadi di lapangan?
2. Menurut Bapak/Ibu bagimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan pengelola terhadap keluhan yang diterima?

(Lingkungan Ekonomi,Sosial dan Politik)

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah di tetapkan?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan lingkungan di desa apakah kondusif atau ada beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan kegagalan program tersebut?

**DOKUMENTASI**

****

Bangunan Pamsimas Desa Barimbun

****

Wawancara dengan Kepala Desa Barimbun



Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Barimbun



Wawancara dengan Pengelola Pamsimas Desa Barimbun



Wawancara dengan Masyarakat Desa Barimbun



Wawancara dengan Masyarakat Desa Barimbun